

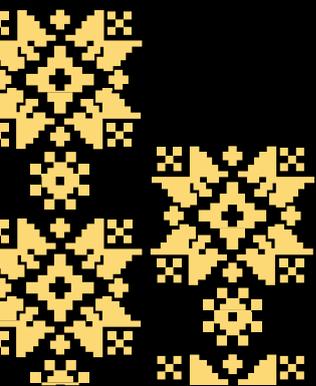
FLASH REPORT

GOVERNMENT FINANCE STATISTIC



2024 Preliminary

Kanwil DJPb Sumsel



GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

Tahun 2024 Preliminary

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Laporan Operasional Statistik



Laporan Operasional (LO) GFS merupakan ikhtisar transaksi Pemerintah Daerah pada periode pelaporan tertentu. LO GFS menyajikan detail transaksi pendapatan dan beban, investasi neto pada aset non keuangan, akuisisi neto aset keuangan dan jumlah neto kewajiban yang timbul

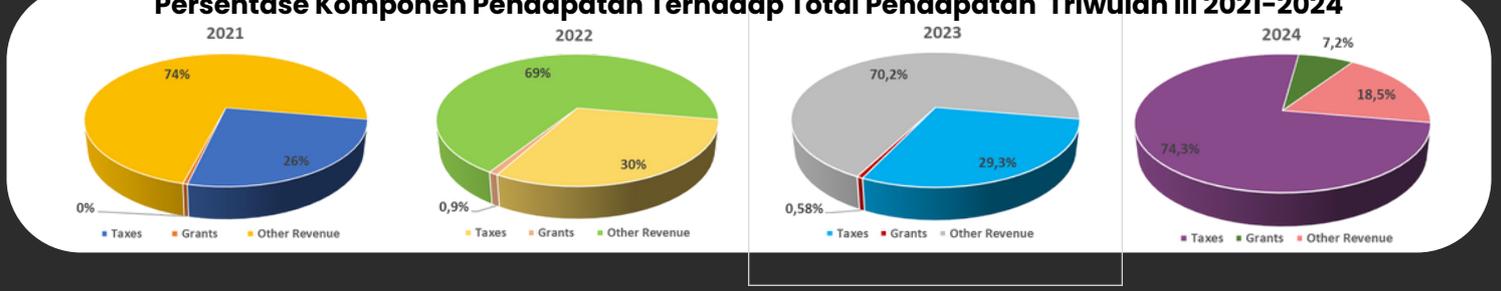


Tren Pendapatan LO Statistik

Perbandingan Pendapatan 2021-2024 (dalam miliar)



Persentase Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Triwulan III 2021-2024



LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH



Beban LO Statistik

Total Expense
Rp43,01 Triliun



01 Pempus
Rp45,8 Triliun

02 Pemda
Rp34,3 Triliun

03 Eliminasi
Rp37,1 Triliun

Compensation of employees
19,85 T ↑ 7,98%

Use of goods and service
16,01 T ↓ 3,87%

Interest
31,85 M ↓ 41,8%

Subsidies
19,07 M ↑ 20,1%

Grants
4,85 T ↓ 36,3%

Social Benefit
93,39 M ↑ 50,3%

Other Expense
2,12 T ↓ 20,8%

Neraca Statistik



Neraca Statistik menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan netto pada akhir periode pelaporan



Financial Assets
Rp23,69 Triliun



Nonfinancial Assets
Rp313,09 Triliun



Liabilities
Rp5,19 Triliun

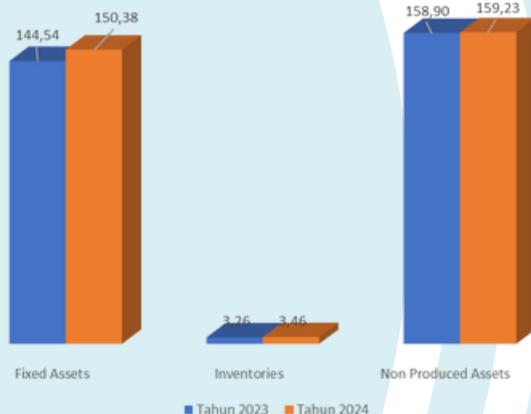


Net Worth
Rp333,59 Triliun

Perbandingan Komponen Neraca Statistik Tahun 2023 dan 2024 (dalam triliun)



Perbandingan Komponen Aset non Keuangan Tahun 2023 dan 2024 (dalam triliun)



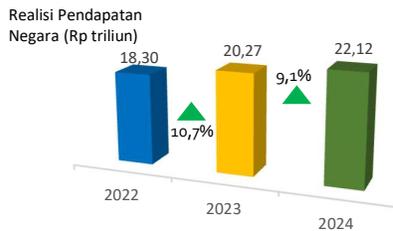


FLASH REPORT

A. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPK-TW, LKPK-TW dan LSKP-TW Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2024

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP -TW)

Pendapatan negara di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp22,12 triliun. Berdasarkan jenisnya, Penerimaan Pajak masih menjadi kontributor utama atas capaian pendapatan negara wilayah Sumsel, yaitu mencapai Rp18,37 triliun atau 83,07% dari total pendapatan negara. PNBP memberikan kontribusi sebesar Rp3,74 triliun atau 16,93%. Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 tumbuh positif sebesar 9,10%(yoy).



Di sisi belanja, Provinsi Sumsel sampai dengan 31 Desember 2024 mencatatkan angka sebesar Rp53,01 triliun berupa belanja pemerintah pusat Rp20,04 triliun dan belanja transfer Rp32,97 triliun. Besaran realisasi belanja tumbuh 4,84% (yoy). Sampai dengan 31 Desember 2024, belanja transfer masih menjadi kontributor utama atas realisasi belanja di wilayah Sumatera Selatan, yaitu 6,2% .

Realisasi Per Jenis Belanja (Rp triliun)



APBN wilayah Sumatera Selatan menunjukkan angka defisit anggaran sebesar minus Rp30,89 triliun, dan angka defisit tersebut meningkat 1,02 persen dibanding tahun 2023.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD -TW)

Dari sisi pendapatan, kinerja APBD sampai dengan 31 Desemberr 2024 mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 11,20% (yoy). Peningkatan pendapatan daerah paling besar dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan transfer, yaitu 13,44% (yoy) . Pertumbuhan positif juga diikuti oleh kinerja APBD dari sisi belanja, yang tumbuh 7,62% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp miliar)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Daerah	45.174,38	40.624,69	11,20%
PAD	9.540,30	9.175,48	3,98%
Pendapatan Transfer	35.129,64	30.967,41	13,44%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	504,44	481,80	4,70%
Belanja Daerah	44.175,29	41.046,98	7,62%
Belanja Operasi	28.881,91	26.464,44	9,13%
Belanja Modal	10.845,01	10.379,39	4,49%
Belanja Tidak Terduga	12,52	6,57	90,75%
Belanja Transfer	4.435,85	4.196,59	5,70%
SURPLUS / DEFISIT	999,10	-422,29	-336,59%
Pembiayaan	2.026,40	2.764,70	-26,70%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	3.025,50	2.342,41	29,16%

Terdapat surplus APBD di tahun 2024 sebesar Rp999,09 miliar. Terjadinya Surplus APBD dipengaruhi oleh Pendapatan daerah Sumsel tumbuh positif yang didorong realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun PAD juga meningkat, namun belum mencerminkan kinerja PAD yang optimal, hal ini terlihat dari masih tergantungnya pemerintah daerah atas transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi belanja operasional nya. Pendapatan Transfer berkontribusi dominan terhadap pendapatan daerah, yaitu 77,76%.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK -TW)

Kinerja positif terlihat pada Pendapatan Pemerintah Konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2024, mencatatkan angka Rp34,43 triliun, yang berarti tumbuh Rp4,66 triliun atau 15,66% (yoy). Pendapatan Perpajakan Konsolidasian masih menjadi kontributor utama pendapatan konsolidasian, yaitu 73,78% dan tumbuh positif 8,15% (yoy). Di sisi lain, kinerja Belanja Pemerintah Konsolidasian juga tumbuh positif sebesar Rp3,84 atau 6,36%.

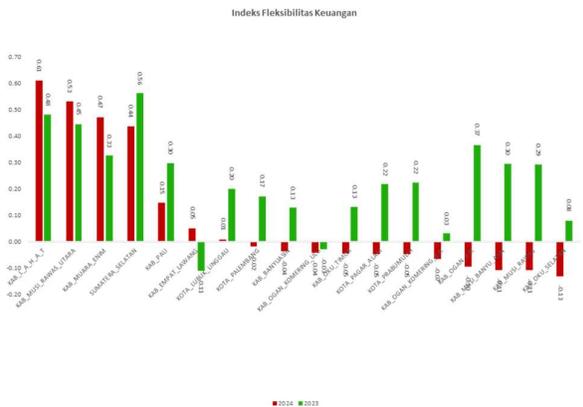
Pemerintah pusat berkontribusi utama dari sisi pendapatan yaitu 64,23% sedangkan dari sisi belanja, pemerintah daerah yang berkontribusi dominan yaitu 68,67%. Angka pendapatan dan belanja konsolidasian merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun-akun resiprokal, yaitu



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada periode triwulan IV tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 12,64% dan 28,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemda di Sumatera Selatan secara umum mempunyai kapasitas positif untuk mendanai belanja operasional dan melakukan pembayaran pokok utang dengan menggunakan pendapatan daerah yang belum ada peruntukan.

Hal ini menunjukkan adanya indikasi dana yang belum ditentukan peruntukannya dan berpotensi menjadi SiLPA. Angka rasio fleksibilitas yang terlalu besar menunjukkan kinerja daerah yang tidak begitu perform namun rasio yang terlalu kecil menjadi indikator pengelolaan keuangan yang tidak baik.

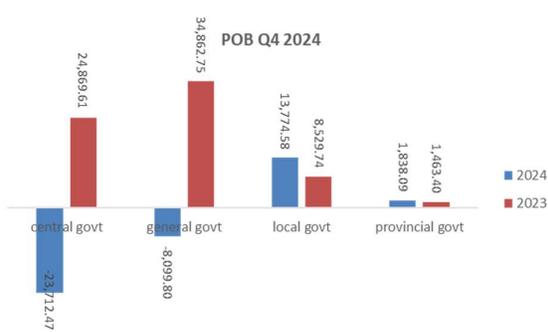
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023, nilai rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan penurunan. Hal dapat menjadi indikasi bahwa dana pendapatan yang diperoleh dari pemda masih mampu dikelola secara aktif dalam bentuk belanja daerah.



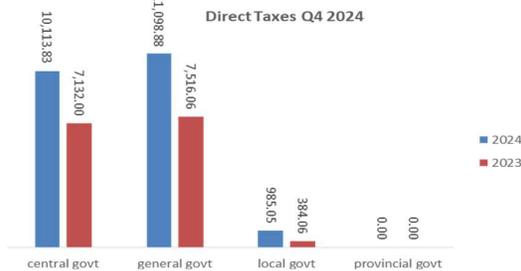


Operasioanal Statistik Keuangan Pemerintah (LO LSKP). Di sisi lain, terdapat pertumbuhan NOB pada level *local government*, yaitu pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pertumbuhan dikarenakan terdapatnya kenaikan pendapatan khususnya pada pendapatan transfer.

Selain itu, pada **Nilai Keseimbangan Operasi Primer (POB)** sampai dengan triwulan IV 2024 juga menunjukkan negatif yaitu sebesar minus Rp8,09 triliun. Nilai POB di triwulan IV 2024 menunjukkan kontraksi sebesar minus Rp42,96 triliun atau 123,23% dari periode yang lalu. Nilai negatif dikontribusi oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat berada pada kondisi pendapatan yang tidak menutupi belanja operasional.

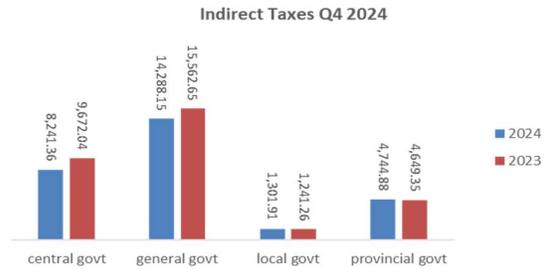


Analisis indikator fiskal makro ekonomi memberikan gambaran tambahan atas kondisi fiskal melalui beberapa indikator a.l pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak modal dan belanja konsumsi pemerintah. Kinerja fiskal makro ekonomi Sumatera Selatan s.d Triwulan IV untuk **Pajak Langsung (Direct Taxes)** pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11,09 triliun, mengalami kenaikan pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp3,58 triliun atau 47,67% dibanding periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp7,51 triliun. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari kenaikan PPh 21 pribadi dan Pajak Bumi dan Bangunan.



Dilihat dari kontribusi penerimaan *direct taxes*, paling besar berasal dari tingkatan pemerintah pusat (*central government*) yang didorong oleh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Dari sisi pertumbuhan, pemerintah kabupaten/kota (*local government*) memberikan pertumbuhan sebesar 63,90% yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nilai Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*) pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan IV 2024 sebesar Rp14,28 triliun, mengalami penurunan yaitu sebesar minus Rp 1,27triliun atau -8,19% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp15,56 triliun.



Jika dilihat dari angka penerimaan *Indirect Taxes* di triwulan IV 2024, kontraksi penerimaan terjadi pada tingkatan pemerintah pusat sebesar -14,79% (yoy). Untuk tingkatan pemerintahan daerah (*local government* dan *provincial government*) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 4,89% (yoy) dan 2,05% (yoy).

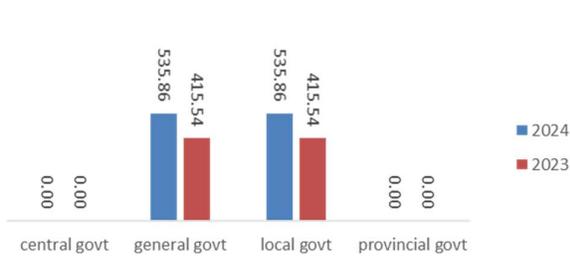
Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Hal tersebut dapat menggambarkan kondisi konsumsi masyarakat di Sumsel masih bertumbuh.

Nilai **Pajak Modal (Capital Taxes)** s.d Triwulan IV 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp535,86 miliar yang mengalami kenaikan sebesar Rp120,32 miliar atau 28,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 415,53 miliar. Pajak Modal (*Capital Taxes*) hanya terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kenaikan Pajak Modal (*Capital taxes*) tersebut mengindikasikan adanya



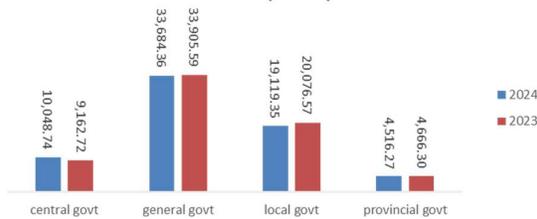
peningkatan investasi/pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.

Capital Taxes Q4 2024



Belanja Konsumsi Final Pemerintah s.d Triwulan IV 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp33,68 triliun yang mengalami penurunan sebesar minus Rp221,22 miliar atau 0,65% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp33,90 triliun.

Government Final Consumption Expenditure Q4 2024

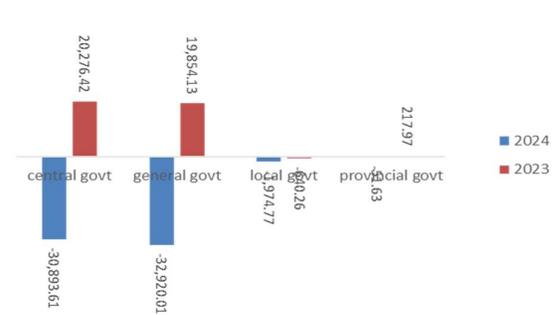


Jika dilihat secara perbandingan per tingkatan, Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada tingkatan *Central Government* memberikan dorongan pertumbuhan terbesar. Pada tingkatan pemerintah daerah (*Local Government* dan *Provincial Government*) mengalami kontraksi dikarenakan peningkatan retribusi di triwulan IV 2024 yang menjadi bagian dari *Sales of Goods and Services*.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

Jika dilihat dari indikator pembiayaan, seluruh pembiayaan di Sumatera Selatan berasal dari pembiayaan dalam negeri, dan pada seluruh tingkat pemerintahan, pemerintah pusat berkontribusi paling besar. Pembiayaan Dalam Negeri (*Domestic Financing*) di Sumatera Selatan di triwulan IV 2024 senilai minus Rp32,92 triliun merupakan Transaksi Aset Keuangan dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.

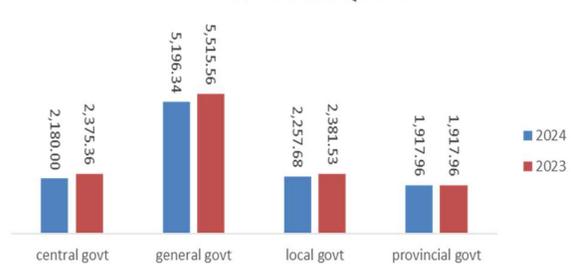
Domestic Financing Q4 2024



4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

Utang Bruto (*Gross Debt*) sampai dengan triwulan IV di lingkup Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka sebesar Rp5,19 triliun. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan dan

Gross Debt Q4 2024



sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek (Utang Transfer dan Belanja yang Masih Harus di Bayar).

C. Permasalahan/Isu Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Berdampak Pada Kinerja Keuangan Dan Statistik

- Proporsi alokasi belanja modal di Sumatera Selatan mayoritas dibawah 40%

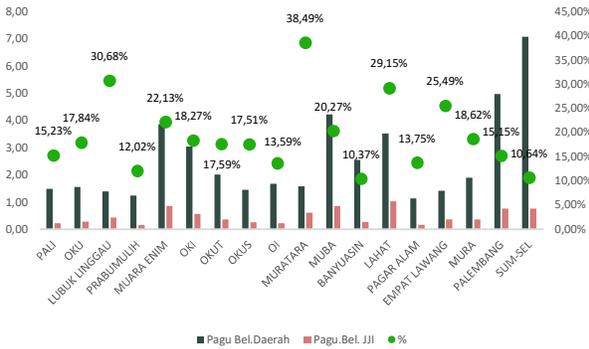
Upaya peningkatan belanja daerah yang berkualitas telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan transfer. Belanja infrastruktur pelayanan publik yang dimaksud merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau



pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah. Belanja infrastruktur dimaksud berkorelasi erat dengan belanja modal khususnya belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Berdasarkan data alokasi pagu APBD 2024 pada Pemda lingkup Sumsel proporsi alokasi belanja dimaksud belum sebesar 40% atau melampaui.

Perbandingan Alokasi Belanja dengan Alokasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.



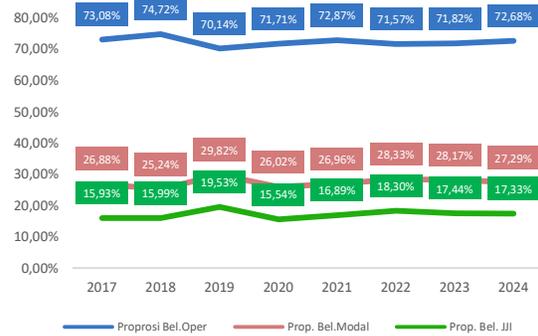
Secara rata-rata, pemerintah daerah di Sumsel mengalokasikan sebesar 18,35%. Angka tersebut masih jauh untuk memenuhi alokasi minimal 40% yang telah ditetapkan dalam UU. Pemda yang mengalokasikan tertinggi terdapat pada Pemda Musi Rawas Utara (Muratara) sebesar 38,49% sedangkan alokasi terendah terdapat pada Pemprov Sumsel sebesar 10,64%.

Penerapan alokasi minimal berdasarkan UU HKPD diterapkan paling lambat 5 tahun sejak diundangkan, maka pemda di Sumsel masih memiliki waktu s.d tahun 2027 untuk melakukan pengaturan proporsi belanja sesuai ketentuan dimaksud.

2. Belanja daerah di Sumsel masih didominasi oleh belanja operasional.

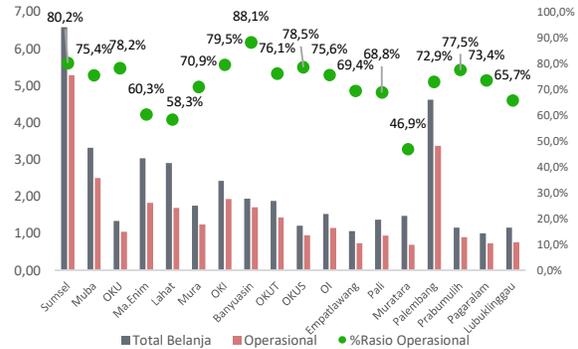
Secara rata-rata proporsi belanja operasional APBD 2024 di Sumsel sebesar 72,68%. Belanja operasional dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemda dalam menjalankan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.

Prprosi Bel. Operasional, Bel. Modal & Bel. JJI (2017-2024)



Terlihat dari grafik diatas bahwa proporsi belanja daerah (dikurangi belanja transfer) yang dipergunakan untuk operasional cukup besar (diatas 70%) dan hal tersebut terlihat sejak tahun 2017. Belanja modal yang diharapkan akan memberikan dampak jangka Panjang terhadap perekonomian daerah dan menjadi potensi peningkatan PAD di masa yang akan datang hanya mendapatkan bagian rata-rata sebesar 27,34%, khusus untuk belanja modal yang dipergunakan untuk jalan, irigasi dan jaringan rata-rata sebesar 17,12%.

Proporsi Belanja Operasional 2024 per Pemda



Pemda yang memiliki proporsi belanja operasional yang paling besar terdapat pada Pemda Banyuasin sebesar 88,1% sedangkan Pemda yang memiliki proporsi belanja operasional terkecil terdapat pada Pemda Muratara sebesar 46,9%. Belanja operasional Pemda Banyuasin dipengaruhi adanya pembayaran belanja bunga dan belanja hibah.

D. Resume Pelaksanaan Kegiatan

Pada periode triwulan IV 2024, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berdampak juga pada kualitas GFS, telah dilaksanakan kegiatan FGD



dengan Pemerintah Daerah lingkup Prov. Sumatera Selatan pada tanggal 18 November 2024.



Kegiatan ini dilaksanakan secara *onsite* bertempat di Aula Grdung Keuangan Negara Palembang yang diikuti oleh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Prov. Sumsel, BPKP Perwakilan Prov. Sumsel serta BPKAD lingkup Prov. Sumsel. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka diskusi terkait kondisi penyelesaian matriks tindak lanjut BPK atas LKPD 2023 dan penyusunan LKPD tahun 2024. Acara juga diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait pengumpulan data LKPD yang berkualitas guna melihat gambaran keuangan daerah khususnya APBD secara kompherensif;

Selanjutnya, dalam rangka publikasi laporan GFS Triwulan III 2024, telah dilakukan melalui fasilitas *Knowledge Management System (KMS)* Kanwil DJPb Sumsel yang dapat diakses secara publik melalui *link*: bit.ly/RAGITDOBEL03.



Untuk amplifikasi lebih lanjut, publikasi GFS juga dilakukan melalui *website* DJPb Sumsel



yang dapat diakses di alamat <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel>

E. Kesimpulan dan Saran

1. Pendapatan pemerintah pusat di wilayah Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan positif, didorong oleh penerimaan pajak yang menjadi kontributor utama. Meskipun belanja pemerintah pusat dan transfer meningkat, defisit anggaran negara menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pada tingkat daerah, APBD mengalami surplus, namun ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat menunjukkan masih adanya ketergantungan fiskal terhadap dana pusat untuk memenuhi belanja operasional.

Dari sisi statistik keuangan pemerintah, keseimbangan operasi mencatatkan angka negatif dikarenakan beban (*expense*) lebih besar dari pendapatan (*revenue*). Baik pendapatan maupun beban mengalami kontraksi dibanding tahun 2023. Pada sisi pendapatan terkontraksi sangat signifikan dikarenakan pada triwulan IV 2024, komponen pendapatan penyesuaian pada laporan statistik keuangan pemerintah pusat, yang secara angka merupakan kontributor utama pada pendapatan LO LSKP, sudah dihilangkan.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan IV 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan peningkatan ketergantungan pada pendapatan transfer.

Mayoritas Pemda di Sumsel masih bergantung pada sektor primer (pertambangan dan pertanian/perkebunan), yang berdampak pada rendahnya kontribusi pajak daerah. Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kota Palembang memiliki rasio lebih baik karena pengelolaan pajak daerah yang lebih optimal, seperti PKB, Bea Balik Nama, dan BPHTB. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi sektor ekonomi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

3. Belanja modal di Sumatera Selatan belum mencapai ketentuan minimal 40% yang diamanatkan dalam UU HKPD, sebaliknya, belanja operasional masih mendominasi pengeluaran daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran daerah lebih banyak digunakan



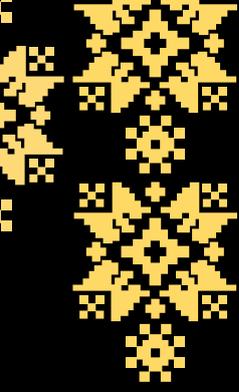


untuk kebutuhan rutin pemerintahan dibandingkan investasi infrastruktur yang berdampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya belanja modal, terutama untuk infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan menghambat peningkatan kualitas layanan publik.

Untuk mencapai target minimal alokasi belanja modal 40% sebelum 2027 sesuai yang diamanatkan dalam UU HKPD, pemda di Sumsel perlu melakukan strategi optimalisasi anggaran, termasuk efisiensi belanja operasional, pengurangan belanja yang kurang produktif yang tidak memberikan dampak langsung atau signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, atau pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu ditingkatkan agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Selain itu, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan APBD harus diperkuat guna memastikan bahwa setiap alokasi belanja benar-benar mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, diharapkan alokasi belanja yang kurang efisien dapat dialihkan untuk alokasi belanja yang lebih berkualitas seperti belanja modal yang berdampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang juga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.





LAMPIRAN FACE

LKPK-TW

LKPP-TW

LKPD-TW

LSKP-TW

LSKPP-TW

LSKPD-TW



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	Pendapatan Negara dan Hibah	34.439.403.265.713	29.775.702.979.559
A.1	Pendapatan Perpajakan	25.409.423.745.951	23.495.130.349.436
1	Pajak Dalam Negeri	25.066.557.969.086	23.198.134.873.104
2	Pajak Perdagangan Internasional	342.865.776.865	296.995.476.332
A.2	Pendapatan Bukan Pajak	8.911.783.321.882	6.116.223.805.901
1	Pendapatan Sumber Daya Alam		
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	356.704.247.269	478.316.706.426
3	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	2.702.591.741.470	2.387.555.713.010
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LRA	2.399.950.903.878	
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		123.071.698.000
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	3.567.580.547	
7	Bantuan Keuangan - LRA		181.922.729.300
8	Pendapatan BLU	3.448.968.848.718	2.945.356.959.165
A.3	Pendapatan Hibah	118.196.197.879	164.348.824.222
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	118.196.197.879	164.348.824.222
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri		
B	Belanja Pemerintah	64.333.918.820.222	60.487.244.553.971
1	Belanja Pegawai	20.188.235.862.165	17.849.847.836.288
2	Belanja Barang Dan Jasa	20.633.648.297.804	18.507.412.366.916
3	Belanja Modal	16.688.159.333.973	14.983.729.010.262
4	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	31.851.632.306	54.788.194.668
5	Subsidi	19.071.945.288	15.882.811.614
6	Hibah	2.113.959.446.987	
7	Belanja Bantuan Sosial	93.339.508.000	62.104.337.000
8	Belanja Lain-lain	12.524.109.745	6.565.622.538
9	Belanja Tak Terduga		
10	Transfer	4.553.128.683.955	7.306.714.735.000
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(29.894.515.554.509)	(30.711.541.574.412)
D	Pembiayaan	2.026.399.735.419	2.764.696.608.268
	Penerimaan Pembiayaan	2.345.393.543.298	3.639.370.289.714
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	2.345.393.543.298	3.639.370.289.714
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan		

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
2	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan	103.200.000	33.927.750.000
3	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		
4	Penerimaan Pembiayaan - Pemda	2.345.290.343.297,71	3.605.442.539.713,82
	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		
			874.673.681.446
	Pengeluaran Pembiayaan	318.993.807.879	874.673.681.446
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	277.483.902.553,55	765.809.405.115
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	271.205.386.423,55	
2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan		735.809.405.115
3	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	6.278.516.130	
4	Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri		
	Penyertaan Modal Negara	41.509.905.325	108.864.276.331
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(27.868.115.819.090)	(27.946.844.966.145)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	22.121.897.858.102	20.276.418.625.248
A.1	Pendapatan Perpajakan	18.377.584.490.651	16.804.928.797.437
1	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	18.034.718.713.786	16.507.933.321.105
2	Pajak Perdagangan Internasional	342.865.776.865	296.995.476.332
A.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.744.313.367.451	3.471.489.827.811
1	Penerimaan Sumber Daya Alam		
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
3	Pendapatan PNPB Lainnya	1.647.770.125.409	1.686.791.437.984
4	Pendapatan BLU	2.096.543.242.042	1.784.698.389.827
A.3	Pendapatan Hibah		
1	Hibah		
B	BELANJA NEGARA	53.015.511.109.115	50.565.670.016.097
B.1	Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	20.041.349.839.213	16.330.141.530.139
1	Belanja Pegawai	6.001.221.949.015	5.198.320.024.637
2	Belanja Barang	8.168.244.892.695	6.502.229.116.199
3	Belanja Modal	5.843.153.433.503	4.604.342.501.303
4	Belanja Bantuan Sosial	28.729.564.000	25.249.888.000
B.2	Transfer ke Daerah	32.974.161.269.902	34.235.528.485.958
1	Dana Transfer Umum	24.555.932.219.495	31.666.224.153.068
	Transfer Dana Bagi Hasil	11.202.494.030.800	25.780.994.499.695
	Transfer Dana Alokasi Umum	13.353.438.188.695	13.540.987.828.695
2	Dana Transfer Khusus	5.585.703.314.707	12.240.006.671.000
	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	1.400.771.910.611	5.635.089.363.873
	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.184.931.404.096	1.512.259.719.656
2	Dana Insentif Daerah/fiskal	239.906.026.500	4.122.829.644.217
3	Dana Desa	2.592.619.709.200	250.140.289.500
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	(30.893.613.251.013)	(30.289.251.390.849)
D	Pembiayaan		
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA/SIKPA	(30.893.613.251.013)	(30.289.251.390.849)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	Pendapatan Pemerintah Daerah	45.174.383.256.415	40.624.690.240.564
A.1	Pendapatan Asli Daerah	9.540.303.764.920	9.175.476.757.446
1	Pajak Daerah	7.031.839.255.300	6.690.201.551.999
2	Retribusi Daerah	185.688.682.709	128.715.551.921
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	356.704.247.269	478.316.706.426
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.966.071.579.642	1.878.242.947.100
A.2	Pendapatan Transfer	35.129.639.401.784	30.967.413.531.769
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	32.293.546.085.537	27.966.046.180.079
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	4.312.795.902.795	3.649.661.042.781
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.289.470.733.083	6.997.551.147.506
1.3	Dana Alokasi Umum	13.236.333.066.397	12.239.298.026.853
1.4	Dana Alokasi Khusus	5.454.946.383.262	5.079.535.962.939
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.832.525.735.700	2.819.444.622.390
2.1	Dana Penyesuaian		
2.2	Dana Insentif Daerah	239.906.026.500	373.211.987.500
2.3	Dana Desa	2.592.619.709.200	2.446.232.634.890
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	3.567.580.547	181.922.729.300
3.1	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA		
4	Transfer Bantuan Keuangan		
A.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	504.440.089.710	481.799.951.349
1	Pendapatan Hibah	118.196.197.879	164.348.824.222
2	Pendapatan Lainnya	386.243.891.831	317.451.127.127
B	Belanja Negara	44.175.285.559.911	41.046.980.424.127
B.1	Belanja Operasi	28.881.910.286.839	26.464.436.157.335
1	Belanja Pegawai	14.187.013.913.150	12.651.527.811.651
2	Belanja Barang dan Jasa	12.465.403.405.109	12.005.183.250.717
3	Belanja Bunga	31.851.632.306	54.788.194.668
4	Subsidi	19.071.945.288	15.882.811.614
5	Hibah	2.113.959.446.987	1.700.199.639.686
6	Bantuan Sosial	64.609.944.000	36.854.449.000
B.2	Belanja Modal	10.845.005.900.470	10.379.386.508.959
1	Belanja Modal Tanah	42.783.376.583	34.548.876.526
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.399.024.703.499	1.581.857.927.214
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.070.478.305.208	2.003.298.328.433
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	6.887.282.981.205	6.426.406.266.066
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	343.899.017.963	247.980.713.188

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
6	Belanja Modal Aset Lainnya	22.277.832.285	31.269.967.215
7	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan		15.254.212.235
8	Belanja Modal BLUD	79.259.683.726	38.770.218.082
B.3	Belanja Tak Terduga	12.524.109.745	6.565.622.538
1	Belanja Tak Terduga	12.524.109.745	6.565.622.538
C	Transfer	4.435.845.262.857	4.196.592.135.295
C.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	57.976.170.665	54.545.720.051
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	55.159.230.887	54.545.720.051
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.816.939.778	
C.2	Transfer Bantuan Keuangan	4.377.869.092.192	4.142.046.415.244
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	200.067.771.000	129.032.263.000
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.177.801.321.192	4.013.014.152.244
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
D	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	999.097.696.503	(422.290.183.563)
E	Pembiayaan	2.026.399.735.419	2.764.696.608.268
E.1	Penerimaan Pembiayaan	2.345.393.543.298	3.639.370.289.714
1	Penggunaan SiLPA	2.345.290.343.298	3.605.442.539.714
2	Pencairan Dana Cadangan		
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4	Pinjaman Dalam Negeri	33.927.750.000	33.927.750.000
5	Penerimaan Kembali Piutang	103.200.000	
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		
E.2	Pengeluaran Pembiayaan	318.993.807.879	874.673.681.446
1	Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	41.509.905.325	108.864.276.331
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	277.483.902.554	735.809.405.115
4	Pemberian Pinjaman Daerah		
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		
F.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	3.025.497.431.922	2.342.406.424.704

**NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	ASET	337.048.575.604.087	327.838.239.333.581
A.1	Aset Lancar	14.215.700.365.538	11.043.323.721.666
1	Kas dan setara kas	5.446.267.069.263	4.002.484.291.800
2	Uang muka rekening BUN-khusus pusat		
3	Investasi jangka pendek	786.606.605.000	1.051.506.605.000
4	Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	121.713.310.687	63.136.441.773
5	Piutang	4.394.790.490.699	2.660.890.268.011
	Piutang Perpajakan	3.250.578.204.770	1.531.771.882.443
	Piutang Bukan Pajak	2.807.641.096.120	2.683.412.232.490
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	34.088.287.598	34.088.287.598
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	92.955.625	163.438.057
	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman		
	Piutang lain-lain	45.056.645.426	129.303.159.271
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.742.666.698.839)	(1.717.848.731.847)
6	Persediaan	3.466.322.889.888	3.265.306.115.081
7	Piutang PFK		
A.2	Investasi jangka panjang	11.209.223.890.384	11.167.713.985.059
1	Investasi jangka panjang non permanen	388.603.437	388.603.437
2	Investasi jangka panjang permanen	11.208.835.286.947	11.167.325.381.622
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
A.3	Aset Tetap	301.648.909.153.090	295.577.688.451.749
1	Tanah	159.145.277.374.810	158.875.385.679.065
2	Peralatan dan Mesin	34.375.823.624.378	31.968.908.386.269
3	Gedung dan Bangunan	44.242.608.439.629	41.493.699.941.289
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	163.293.824.643.091	154.651.488.539.999
5	Aset tetap lainnya	3.520.277.545.719	3.236.391.960.635
6	Konstruksi dalam pengerjaan	7.130.200.265.816	6.946.191.680.422
7	Konsesi Jasa	7.482.068.386.241	4.426.089.970.939
8	Akumulasi penyusutan	(117.541.173.691.805)	(106.020.467.706.869)
9	Aset Tetap Yang Belum Diregister	2.565.210	
A.4	Properti Investasi	17.795.509.085	17.850.712.407
A.5	Dana Cadangan		101.613.577.486
1	Dana Cadangan		101.613.577.486
A.6	Piutang Jangka Panjang	48.583.510.997	48.603.648.319
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	678.000.281	997.238.301
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	40.768.975.397	40.723.200.105
3	Piutang jangka panjang kredit pemerintah		

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
4	Piutang jangka panjang lainnya	7.309.501.295	7.370.375.295
5	Penyisihan piutang jangka panjang	(172.965.976)	(167.511.934)
A.7	Aset Lainnya	9.908.363.174.993	9.881.445.236.895
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	1.576.334.457.564	1.574.550.737.140
2	Aset tidak berwujud	923.348.258.596	777.433.893.318
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	372.477.996.036	456.382.892.008
4	Dana Penjaminan		
5	Dana Kelolaan BLU		
6	Aset lain-lain	7.875.700.214.721	7.978.829.054.426
7	Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
8	Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
9	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(839.497.751.925)	(905.751.339.997)
B	KEWAJIBAN/UTANG	5.196.342.610.900	5.515.557.898.498
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	3.504.788.428.842	3.729.306.852.107
1	Utang perhitungan pihak ketiga	9.199.938.898	9.199.938.898
2	Utang kepada pihak ketiga	2.247.758.242.765	2.360.194.614.047
3	Utang bunga	2.096.014.473	2.096.014.473
4	Utang subsidi		
5	Utang Transfer	1.493.782.702	1.242.737.152
6	Bagian lancar utang jangka panjang	205.905.157.280	216.241.699.487
7	Utang surat perbendaharaan negara		
8	Utang Yang Belum Ditagihkan		
9	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	202.092.682.234	
10	Pendapatan Diterima Dimuka	61.193.590.774	
11	Utang jangka pendek lainnya		358.326.252.718
12	Uang Muka	656.462.268	525.975.970
13	Utang Jangka Pendek Lainnya	781.587.712.736	781.479.619.362
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.691.554.182.058	1.786.251.046.391
1	Utang jangka panjang dalam negeri	233.054.697.569	346.568.452.394
2	Utang jangka panjang luar negeri		
B.3	Kewajiban Konsesi Jasa	1.458.499.484.489	1.439.682.593.997
1	Kewajiban Konsesi Jasa	1.458.499.484.489	1.439.682.593.997
C	EKUITAS	331.852.232.993.188	322.322.681.435.083

**NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

No	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	ASET	211.538.066.211.610	207.159.322.664.521
A.1	Aset lancar	8.222.564.887.460	5.921.315.851.417
1	Kas dan Setara Kas	2.228.159.476.597	1.655.504.306.963
1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	807.186.988	1.182.438.238
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	14.554.082	350.128.001
1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	918.657.063.665	556.006.268.449
1.4	Kas pada BLU	1.308.680.671.862	1.097.965.472.275
2	Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)	41.000.000.000	305.900.000.000
3	Belanja dibayar di muka	6.551.677.084	11.766.239.062
4	Uang Muka Belanja	60.287.254.870	32.409.076
5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	13.464.424.400	9.927.839.302
6	Piutang	3.108.478.995.441	1.374.578.772.753
6.1	Piutang Pajak	3.250.578.204.770	1.531.771.882.443
6.2	Piutang Bukan Pajak	826.397.162.595	702.168.298.965
6.3	Bagian Lancar TP/TGR	92.955.625	163.438.057
6.4	Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)		-
6.5	Piutang dari Kegiatan BLU	42.804.456.982	127.050.970.827
6.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.011.393.784.531)	(986.575.817.539)
7	Persediaan	2.764.622.337.568	2.563.606.284.261
8	Persediaan Belum Diregister	721.500	-
A.2	Investasi Jangka Panjang		
A.3	Aset Tetap	202.178.129.506.187	200.105.199.760.310
1	Tanah	133.919.360.156.798	133.692.251.837.636
2	Peralatan dan Mesin	15.950.067.460.257	14.942.176.925.648
3	Gedung dan Bangunan	14.141.499.196.995	13.463.069.003.863
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.189.617.005.342	69.434.563.883.455
5	Aset Tetap Lainnya	563.993.974.024	624.007.406.902
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.592.307.224.271	5.408.298.638.877
7	Aset Tetap Belum Diregister	2.565.210	-
8	Aset Konsesi Jasa	7.482.068.386.241	4.426.089.970.939
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(46.660.786.462.951)	(41.885.257.907.010)
A.4	Properti Investasi	18.209.534.000	17.850.712.407
A.5	Piutang Jangka Panjang	7.296.959.150	7.366.774.689
1	Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	160.423.831	163.911.328
2	Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.309.501.295	7.370.375.295
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(172.965.976)	(167.511.934)
A.6	Aset Lainnya	1.112.279.349.728	1.107.589.565.698

LKPK & LSKP Tahun 2024 Preliminary

NO.	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
2	Aset Tak Berwujud	409.458.310.814	268.611.734.627
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	372.477.996.036	456.382.892.008
4	Aset Lain-lain	858.084.676.608	978.010.778.781
5	Akumulasi Penyusutan	(527.741.633.730)	(595.415.839.718)
5.1	Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(385.085.660.851)	(485.934.665.636)
5.2	Akum. Amortisasi Aset Lainnya	(142.655.972.879)	(109.481.174.082)
B	KEWAJIBAN	2.179.995.559.055	2.375.360.549.620
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	721.494.319.340	935.676.200.397
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	463.128.047.963	575.564.419.245
2	Utang Transfer	1.493.782.702	1.242.737.152
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	202.092.682.234	315.749.800.727
4	Uang Jangka Pendek Lainnya	(8.467.106.087)	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	23.947.796.735	42.576.451.991
6	Uang Muka dari KPPN	656.462.268	525.975.970
7	Hibah yang belum disahkan	1.396.859.486	-
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.458.501.239.715	1.439.684.349.223
C	EKUITAS	209.358.070.652.555	204.783.962.114.901
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	211.538.066.211.610	204.783.962.114.901
Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas			

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	ASET	125.510.509.392.477	120.678.916.669.060
A.1	ASET LANCAR	5.993.135.478.078	5.122.007.870.249
1	Kas dan Setara Kas	3.218.107.592.666	2.346.979.984.837
1.1	Kas di Kas Daerah	2.786.859.597.786	745.606.605.000
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	749.746.100	392.393.832
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.319.482.932	1.053.942.878
1.4	Kas di BLUD	283.589.109.298	206.399.240.518
1.5	Kas Lainnya	145.589.656.550	94.995.540.421
1.6	Setara Kas		
2	Investasi Jangka Pendek	745.606.605.000	745.606.605.000
3	Piutang Pendapatan	1.981.243.933.525	1.981.243.933.525
4	Piutang Lainnya	36.340.476.042	36.340.476.042
5	Penyisihan Piutang	(731.272.914.308)	(731.272.914.308)
5	Beban Dibayar Dimuka	41.409.954.333	41.409.954.333
7	Persediaan	701.699.830.821	701.699.830.820
A.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	11.209.223.890.384	11.167.713.985.059
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	388.603.437	388.603.437
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.2	Dana Bergulir	1.200.627.140	1.200.627.140
1.3	Cadangan Dana Bergulir	(812.023.703)	(812.023.703)
1.4	Investasi Non Permanen Lainnya		
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	11.208.835.286.947	11.167.325.381.622
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.208.835.286.947	
2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	
A.3	ASET TETAP	99.470.779.646.903	95.472.488.691.439
1	Tanah	25.225.917.218.012	25.183.133.841.429
2	Peralatan dan Mesin	18.425.756.164.121	17.026.731.460.621
3	Gedung dan Bangunan	30.101.109.242.634	28.030.630.937.426
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.104.207.637.749	85.216.924.656.544
5	Aset Tetap Lainnya	2.956.283.571.695	2.612.384.553.733
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.537.893.041.545	1.537.893.041.545
7	Akumulasi Penyusutan	(70.880.387.228.854)	(64.135.209.799.859)
	Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(12.397.570.823.093)	(12.539.345.241.709)
	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(6.080.476.976.872)	(6.121.067.623.733)
	Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(44.612.241.965.236)	(45.419.584.608.030)
	Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(1.223.374.146.793)	(55.212.326.387)

NO.	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A.4	Dana Cadangan	-	101.613.577.486
A.5	ASET LAINNYA	8.837.370.377.112	8.815.092.544.827
1	Tagihan Jangka Panjang	41.286.551.847	41.236.873.630
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.576.334.457.564	1.574.550.737.140
3	Aset Tidak Berwujud	202.133.829.587	198.486.658.412
4	Aset Lain-lain	7.017.615.538.113	7.000.818.275.645
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(310.335.500.279)
B	KEWAJIBAN	3.016.347.051.845	3.140.197.348.878
B.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.783.294.109.502	2.793.630.651.710
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.199.938.898	9.199.938.898
2	Utang Bunga	2.096.014.473	2.096.014.473
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	205.905.157.280	216.241.699.487
4	Pendapatan Diterima Dimuka	20.437.843.112	20.437.843.112
5	Utang Belanja	1.784.630.194.802	1.784.630.194.802
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	761.024.960.938	761.024.960.938
B.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	233.052.942.343	346.566.697.168
1	Utang Dalam Negeri	233.052.942.343	346.566.697.168
2	Utang Jangka Panjang Lainnya		
C	EKUITAS	122.494.162.340.633	117.538.719.320.182
D	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	125.510.509.392.477	120.678.916.669.060
Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas			

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL	(33.323.018.377.041)	4.356.454.635.966
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	37.369.501.589.365	65.822.062.632.827
1	Pendapatan Perpajakan-LO	29.235.543.942.391	25.661.802.280.849
2	Pendapatan Bukan Pajak-LO	2.015.187.747.185	2.161.679.468.734
2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam		
2.2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	356.704.247.269	621.785.177.040
2.3	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.658.483.499.916	1.539.894.291.694
3	Pendapatan Transfer- LO	2.405.302.543.277	2.464.814.436.240
3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	2.399.772.605.078	2.298.395.711.808
3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		119.740.728.625
3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	3.567.580.547	
3.4	Bantuan Keuangan - LO	1.962.357.652	46.677.995.806
4	Pendapatan BLU -LO	3.373.719.790.723	3.173.200.880.503
4.1	Pendapatan Jasa BLU - LO	3.228.846.339.763	3.048.758.056.813
4.2	Pendapatan Hibah BLU - LO	3.552.644.723	9.627.476.508
4.3	Pendapatan Lainnya BLU - LO	141.320.806.237	114.815.347.182
5	Pendapatan Hibah-LO	187.563.720.901	949.640.208.052
5.1	Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	187.563.720.901	949.640.208.052
6	Pendapatan lainnya-LO	152.183.844.887	31.410.925.358.449
6.1	Pendapatan Lainnya Pemda	139.344.013.621	
6.2	Pendapatan Penyesuaian Akrual	12.839.831.266	100.832.982.491
6.2	Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer		31.310.092.375.958
A.2	BEBAN OPERASIONAL	63.664.054.994.349	56.696.866.946.853
1	Beban Pegawai	20.893.315.767.488	18.368.398.652.612
2	Beban Persediaan	990.713.568.329	982.669.162.794
3	Beban Barang dan Jasa	20.636.746.354.537	17.345.356.608.853
4	Beban Bunga	31.851.632.306	49.571.980.544
5	Beban Subsidi	19.071.945.288	17.108.088.997
6	Beban Hibah	2.113.959.446.987	2.369.123.292.823
7	Beban Bantuan Sosial	93.555.028.000	90.400.526.722
8	Beban Lain-lain		72.628.931.258
9	Beban Akrual Lainnya	11.856.376.279.357	12.632.868.652.242
10	Beban Transfer	7.028.464.972.057	4.768.741.050.008
A.3	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(26.294.553.404.984)	9.125.195.685.974
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	Surplus (Defisist) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi	244.041.534	15.767.738
B.1	Surplus/(Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar	(63.049.179.921)	(61.663.973.215)

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
B.2	Surplus/(Defisit) Penpus Penyelesaian Kewajiban		
B.3	Surplus/(Defisit) Penpus Kegiatan		55.897.700.495
B.4	Surplus/(Defisit) Pemda Penjualan		(93.292.114.113)
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban		(237.365.507)
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan		123.286.682.649
B.7	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	671.453.994.918	24.006.698.047
C	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(25.623.099.410.066)	9.149.202.384.021
	POS LUAR BIASA		(3.451.955.107)
D	SURPLUS/(DEFISIT) LO	(25.623.099.410.066)	9.145.750.428.914

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	25.169.279.602.852	53.068.993.864.549
1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	22.203.704.687.091	18.868.107.356.315
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	8.792.728.248.507	8.255.584.749.673
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	8.525.176.745.253	7.823.203.967.987
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	4.360.963.467.856	2.282.570.222.345
1.4	Pendapatan Cukai	420.823.000	784.289.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	191.320.942.016	199.839.542.480
1.6	Pendapatan Bea Masuk	165.372.358.459	173.807.467.830
1.7	Pendapatan Bea Keluar	167.722.102.000	132.317.117.000
1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain		-
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.896.207.392.739	2.889.397.272.790
2.1	Pendapatan BLU	2.021.294.184.047	1.840.137.639.875
2.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	874.913.208.692	1.049.259.632.915
3	PENDAPATAN HIBAH	69.367.523.022	1.396.859.486
4	PENDAPATAN PENYESUAIAN		31.310.092.375.958
4.1	Pendapatan Dropping Dana Tranfer		31.310.092.375.958
A.2	BEBAN OPERASIONAL	53.113.896.821.940	48.689.988.855.972
1	Beban Pegawai	6.706.301.854.338	5.776.488.429.991
2	Beban Persediaan	990.713.568.329	982.663.142.794
3	Beban Barang dan Jasa	4.323.442.069.877	3.211.767.382.805
4	Beban Pemeliharaan	1.031.682.905.114	653.386.196.810
5	Beban Perjalanan Dinas	738.081.218.601	589.007.068.411
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.209.370.001.416	1.005.892.479.371
7	Beban Bantuan Sosial		25.830.846.000
8	Beban Lain-lain		
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi		4.888.543.581.584
10	Beban Penyusihan Piutang Tak Tertagih		246.317.352.248
11	Beban Transfer	32.974.161.269.902	31.310.092.375.958
A.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27.944.617.219.088)	4.379.005.008.577
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(63.049.179.921)	(61.663.973.215)
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.979.376.127	11.151.445.206
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	70.028.556.048	72.815.418.421
B.2	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
B.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	734.503.174.839	55.913.468.233
1	Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	780.938.103.255	123.178.247.535
2	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	46.434.928.416	67.264.779.302
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	671.453.994.918	(5.750.504.982)
C	SURPLUS/(DEFISIT) LO	(27.273.163.224.170)	4.373.254.503.595

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN	42.581.763.547.215	41.234.596.645.147
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.540.303.764.920	9.379.459.473.407
1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	7.031.839.255.300	6.793.694.924.534
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	185.688.682.709	133.578.032.065
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	356.704.247.269	6.21.785.177.040
1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	1.966.071.579.642	1.830.401.339.768
2	PENDAPATAN TRANSFER	32.537.019.692.584	30.336.647.986.922
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	32.293.546.085.537	29.926.760.983.076
2.1.1	Bagi Hasil Pajak		3.535.695.841.926
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		9.059.896.097.006
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)		12.242.142.874.702
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)		50.890.26.169.442
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	239.906.026.500	244.179.724.500
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO	3.567.580.547	119.740.728.625
2.4	Bantuan Keuangan		45.966.550.721
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	504.440.089.710	1.518.489.184.818
3.1	Pendapatan Hibah	118.196.197.87	948.243.348.566
3.2	Pendapatan Lainnya	386.243.891.831	570.245.836.253
A.2	BEBAN	40.931.717.233.111	36.488.405.967.751
1	BEBAN OPERASI	36.495.871.970.254	34.548.229.416.831
1.1	Beban Pegawai	14.187.013.913.150	12.591.910.222.621
1.2	Beban Barang dan Jasa	13.334.187.659.529	11.885.309.501.456
1.3	Beban Bunga	31.851.632.306	49.571.980.544
1.4	Beban Subsidi	19.071.945.288	17.108.088.997
1.5	Beban Hibah	2.113.959.446.987	2.369.123.292.823
1.6	Beban Bantuan Sosial	64.609.944.000	64.569.680.722
1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.745.177.428.994	7.393.857.544.063
1.8	Beban Penyisihan Piutang		104.150.174.347
1.9	Beban Lain-lain		72.628.931.258
2	BEBAN TRANSFER	4.435.845.262.857	1.940.176.550.919
2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	55.159.230.887	199.897.085.554
2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.816.939.778	
2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya	200.067.771.000	
2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.177.801.321.192	1.740.279.465.365
2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		

NO	URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
A.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.650.046.314.104	4.746.190.677.397
B	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		29.757.203.029
B.1	SURPLUS NON OPERASIONAL		34.757.622.043
1	Surplus penjualan aset non lancar		
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang		
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya		154.550.561.699
B.2	DEFISIT NON OPERASIONAL		159.550.980.712
1	Defisit penjualan aset non lancar		128.049.736.156
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		237.365.507
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		31.263.879.050
C	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.650.046.314.104	4.775.947.880.426
			(3.451.955.107)
D	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		
D.1	PENDAPATAN LUAR BIASA		3.451.955.107
D.2	BEBAN LUAR BIASA		
			4.772.495.925.319
E	SURPLUS/DEFISIT-LO	1.650.046.314.104	189.308.183.742

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :	JUMLAH	
		31 DES 2024	31 DES 2023
A1	Pendapatan	34.877.446.636.547	80.311.475.247.539
A11	Pajak	25.922.895.367.156	23.494.245.357.316
A12	Kontribusi Sosial		
A13	Hibah	2.516.358.940.425	462.723.355.828
A14	Pendapatan Lainnya	6.438.192.328.965	56.354.506.534.395
A2	Beban	43.009.100.296.978	45.503.515.543.709
A21	Kompensasi Pegawai	19.856.356.173.093	18.389.727.914.273
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	16.025.322.355.632	16.670.881.297.179
A23	Konsumsi Aset Tetap		
A24	Bunga	31.851.632.306	54.788.194.668
A25	Subsidi	19.071.945.288	15.882.811.614
A26	Hibah	4.857.271.580.873	7.625.236.205.876
A27	Manfaat Sosial	93.339.508.000	62.104.337.000
A28	Beban Lainnya	2.125.887.101.788	2.684.894.783.100
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	(8.131.653.660.431)	34.807.959.703.830
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	(8.131.653.660.431)	34.807.959.703.830
Transaksi Aset Non Keuangan :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	19.318.819.978.545	14.953.831.262.145
A311	Aset Tetap	16.249.298.562.301	14.905.490.614.930
A312	Perubahan Persediaan	3.001.645.846.261	
A313	Barang Berharga		
A314	Aset Non Produksi	67.875.569.983	48.340.647.215
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(63.135.137.628)	19.854.128.441.685
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(340.619.040.182)	19.152.246.786.570
A321	Dalam Negeri	(340.619.040.182)	19.152.246.786.570
A322	Luar Negeri		
A323	Monetary gold and SDRs		
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(277.483.902.554)	(701.881.655.115)
A331	Dalam Negeri	(277.483.902.554)	(701.881.655.115)
A332	Luar Negeri		

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		31 DES 2024	31 DES 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	22.114.918.481.975	70.830.937.196.139
A11	Pajak	18.355.194.627.076	16.804.043.805.317
A12	Kontribusi Sosial		
A13	Hibah	1.318.419.000	2.296.377.402
A14	Pendapatan Lainnya	3.758.405.435.899	54,024,597,013,420
A2	Beban	45.827.392.325.435	45.961.327.514.794
A21	Kompensasi Pegawai	6.001.221.949.015	5.738.200.102.622
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	6.728.432.671.543	4.965.333.373.583
A23	Konsumsi Aset Tetap		
A24	Bunga		
A25	Subsidi		
A26	Hibah	32.974.161.269.902	34.235.528.485.958
A27	Manfaat Sosial	28.729.564.000	25.249.888.000
A28	Beban Lainnya	94.846.870.975	997.015.664.631
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	(23.712.473.843.460)	24.869.609.681.345
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	(23.712.473.843.460)	24.869.609.681.345
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	7.181.139.407.553	4.593.191.056.097
A311	Aset Tetap	5.811.081.863.976	4.579.399.285.408
A312	Perubahan Persediaan	1.344.965.350.177	
A313	Barang Berharga		
A314	Aset Non Produksi	25.092.193.400	13.791.770.689
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(30.893.613.251.013)	20.276.418.625.248
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(30.893.613.251.013)	20.276.418.625.248
A321	Dalam Negeri	(30.893.613.251.013)	20.276.418.625.248
A322	Luar Negeri		
A323	Monetary gold and SDRs		
A33	Keterjadian Kewajiban Neto		
A331	Dalam Negeri		
A332	Luar Negeri		

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		31 DES 2024	31 DES 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	49.915.811.703.312	44.106.248.473.705
A11	Pajak	7.567.700.740.080	6.690.201.551.999
A12	Kontribusi Sosial		-
A13	Hibah	39.521.723.583.801	34.441.227.889.647
A14	Pendapatan Lainnya	2.826.387.379.431	2.974.819.032.059
A2	Beban	34.334.991.520.284	34.167.898.451.220
A21	Kompensasi Pegawai	13.855.134.224.077	12.651.527.811.651
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	9.296.889.684.089	11.705.547.923.596
A23	Konsumsi Aset Tetap		
A24	Bunga	31.851.632.306	54.788.194.668
A25	Subsidi	19.071.945.288	15.882.811.614
A26	Hibah	9.036.393.859.711	8.015.418.142.223
A27	Manfaat Sosial	64.609.944.000	36.854.449.000
A28	Beban Lainnya	2.031.040.230.813	1.687.879.118.469
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	15.580.820.183.028	9.938.350.022.485
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	15.580.820.183.028	9.938.350.022.485
Transaksi Aset Non Keuangan :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	16.484.291.767.430	10.360.640.206.048
A311	Aset Tetap	10.438.216.698.325	10.326.091.329.522
A312	Perubahan Persediaan	6.003.291.692.522	
A313	Barang Berharga		
A314	Aset Non Produksi	42.783.376.583	34.548.876.526
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	-2.026.399.735.419	(422.290.183.563)
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(2.303.883.637.973)	(1.124.171.838.678)
A321	Dalam Negeri	(2.303.883.637.973)	(1.124.171.838.678)
A322	Luar Negeri		
A323	Monetary gold and SDRs		
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(277.483.902.554)	(701.881.655.115)
A331	Dalam Negeri	(277.483.902.554)	(701.881.655.115)
A332	Luar Negeri		

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	333.594.285.286.558	324.040.697.678.865
61	Aset Non Keuangan	313.092.578.273.456	306.711.356.886.984
611	Aset Tetap	150.388.154.651.056	144.540.350.181.924
6111	Gedung dan Bangunan	131.158.152.611.674	125.536.680.620.320
6112	Peralatan dan Mesin	7.858.009.588.909	7.987.605.733.833
6113	Aset Tetap Lainnya	11.371.992.450.473	11.016.063.827.771
612	Persediaan	3.466.322.889.888	3.265.306.115.081
614	Aset Nonproduksi	159.238.100.732.511	158.905.700.589.978
6141	Tanah	159.145.277.374.810	158.875.385.679.065
6144	Aset Tak Berwujud	92.823.357.701	30.314.910.913
62	Aset Keuangan	25.698.049.624.002	22.844.898.690.378
6202	Uang dan Deposito	6.563.564.298.854	5.306.087.366.294
6203	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.33	306.288.603.437
6204	Pinjaman	41.388.603.437	
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.208.835.286.947	11.167.325.381.622
6208	Piutang Lainnya	7.884.261.434.763	6.065.197.339.025
621	Aset Keuangan Domestik	23.039.429.146.078	22.844.898.690.378
6212	Uang dan Deposito	4.927.239.801.781	5.306.087.366.294
6213	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.33	306.288.603.437
6214	Pinjaman		
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.063.746.358.107	11.167.325.381.622
6218	Piutang Lainnya	6.705.169.178.852	6.065.197.339.025
622	Aset Keuangan Luar Negeri		
6222	Uang dan Deposito		
6223	Surat Berharga Selain Saham		
6224	Pinjaman		
6225	Saham dan Ekuitas Lain		
6228	Piutang Lainnya		
63	Kewajiban	5.196.342.610.900	5.515.557.898.498
6303	Surat Berharga Utang		
6304	Pinjaman	438.958.099.622	562.808.396.655
6308	Utang Lainnya	4.757.384.511.278	4.952.749.501.843
631	Kewajiban Domestik	5.196.342.610.900	5.515.557.898.498
6313	Surat berharga selain saham		

6314	Pinjaman	438.958.099.622	562,808,396,655
6318	Utang Lainnya	4.757.384.511.278	4.952.749.501.843
632	Kewajiban Luar Negeri		
6323	Surat berharga selain saham		
6324	Pinjaman		
6328	Utang Lainnya		

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	210.368.850.031.617	205.770.705.444.374
61	Aset Non Keuangan	205.700.349.428.032	203.337.863.430.668
611	Aset Tetap	68.923.542.854.465	67.051.690.397.858
6111	Gedung dan Bangunan	64.362.147.682.369	62.347.096.542.955
6112	Peralatan dan Mesin	3.365.435.661.019	3.500.219.514.921
6113	Aset Tetap Lainnya	1.205.890.251.844	1.204.374.339.982
612	Persediaan	2.764.623.059.068	2.563.606.284.261
614	Aset Nonproduksi	134.012.183.514.499	133.722.566.748.549
6141	Tanah	133.919.360.156.798	133.692.251.837.636
6144	Aset Tak Berwujud	92.823.357.701	30.314.910.913
62	Aset Keuangan	6.848.496.162.640	4.808.202.563.326
6202	Uang dan Deposito	2.599.850.101.188	2.111.887.198.971
6203	Surat Berharga Selain Saham	41.000.000.000	305.900.000.000
6204	Pinjaman		
6205	Saham dan Ekuitas Lain		
6208	Piutang Lainnya	4.207.646.061.452	2.390.415.364.355
621	Aset Keuangan Domestik	6.848.496.162.640	4.808.202.563.326
6212	Uang dan Deposito	2.599.850.101.188	2.111.887.198.971
6213	Surat Berharga Selain Saham	41.000.000.000	305.900.000.000
6214	Pinjaman		
6215	Saham dan Ekuitas Lain		
6218	Piutang Lainnya	4.207.646.061.452	2.390.415.364.355
63	Kewajiban	2.179.995.559.055	2.375.360.549.620
6303	Surat Berharga Utang		
6304	Pinjaman		
6308	Utang Lainnya	2.179.995.559.055	2.375.360.549.620
631	Kewajiban Domestik	2.179.995.559.055	2.375.360.549.620
6313	Surat berharga selain saham		
6314	Pinjaman		
6318	Utang Lainnya	2.179.995.559.055	2.375.360.549.620
632	Kewajiban Luar Negeri		
6323	Surat berharga selain saham		
6324	Pinjaman		
6328	Utang Lainnya		

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	123.225.435.254.941	113.913.779.171.990
61	Aset Non Keuangan	107.392.228.845.424	98.172.544.393.299
611	Aset Tetap	81.464.611.796.591	72.003.624.590.837
6111	Gedung dan Bangunan	66.796.004.929.305	59.397.983.032.721
6112	Peralatan dan Mesin	4.492.573.927.891	4.284.426.965.497
6113	Aset Tetap Lainnya	10.176.032.939.396	8.321.214.592.619
612	Persediaan	701.699.830.820	872.453.187.918
614	Aset Nonproduksi	25.225.917.218.013	25.296.466.614.545
6141	Tanah	25.225.917.218.013	25.296.466.614.545
6144	Aset Tak Berwujud		
62	Aset Keuangan	20.008.843.881.481	18.875.835.839.345
6202	Uang dan Deposito	3.963.714.197.667	3.690.243.790.428
6203	Surat Berharga Selain Saham	388.603.437	33.545.100.361
6204	Pinjaman		3.828.706.977
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.208.835.286.948	10.960.590.465.646
6208	Piutang Lainnya	4.835.905.793.429	4.187.627.775.933
621	Aset Keuangan Domestik	20.008.843.881.481	18.875.835.839.345
6212	Uang dan Deposito	3.963.714.197.667	3.690.243.790.428
6213	Surat Berharga Selain Saham	388.603.437	33.545.100.361
6214	Pinjaman		3.828.706.977
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.208.835.286.948	10.960.590.465.646
6218	Piutang Lainnya	4.835.905.793.429	4.187.627.775.933
63	Kewajiban	4.175.637.471.963	3.134.601.060.654
6303	Surat Berharga Utang		
6304	Pinjaman	438.958.099.622	1.271.795.303.138
6308	Utang Lainnya	3.736.679.372.341	1.862.805.757.516
631	Kewajiban Domestik	4.175.637.471.963	3.134.601.060.654
6313	Surat berharga selain saham		
6314	Pinjaman	438.958.099.622	1.271.795.303.138
6318	Utang Lainnya	3.736.679.372.341	1.862.805.757.516
632	Kewajiban Luar Negeri		
6323	Surat berharga selain saham		
6324	Pinjaman		
6328	Utang Lainnya		



METADATA



META DATA

INFORMASI DASAR	
1. Nama Data	: LKPK & LSKP Tingkat Wilayah Triwulan IV Tahun 2024 Preliminary
2. Penyelenggara	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Statistik Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat	: Gedung Keuangan Negara LT.2 JL. Kapten A. Rivai No. 2-4
4. Nomor Telepon	: 0711-351476
5. Nomor Faksimili	: 0711-310891
6. Email	: Kanwildjpbnsumsel@kemenkeu.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan penggabungan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Satuan Kerja (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama satu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan.</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Periode Triwulan IV yang disusun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian dari seluruh UAKPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan UAKKBUN Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi LRA, LO dan Neraca;2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian LKPD seluruh pemerintah daerah lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi LRA, LO Estimasi dan Neraca Estimasi;3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian LKPP-TW dan LKPDK-TW yang meliputi LRA, LO Estimasi dan Neraca Estimasi.	

4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang disusun meliputi LSKP-LO dan LSKP-Neraca. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) merupakan hasil mapping akun GFS berdasarkan LKPP-TW dan LKPKD-TW

CAKUPAN DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian, Laporan Operasional Estimasi dan Neraca Estimasi Pemerintah Daerah Konsolidasian
2. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Pemerintah Pusat yang didapat dari SIKRI Modul Pelaporan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian merupakan hasil konsolidasian antara LKPP-TW dengan LKPKD-TW
4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan mapping ke akun GFS dari laporan LKPP-TW dan LKPKD-TW

PERIODESASI PUBLIKASI

Triwulan IV Tahun 2024 Preliminary

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Laporan GFS Triwulan IV Tahun 2024 Preliminary selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari 2025

JADWAL PUBLIKASI KE DEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)

Satu bulan sebelum publikasi berikutnya diterbitkan

SUMBER DATA

Data keuangan pemerintah daerah berupa data realisasi anggaran 16 Kab/Kota lingkup Kanwil DJPb Sumsel diperoleh langsung dari Pemkab/Kota lingkup Sumsel selebihnya 2 kab/Kota yaitu Kab. Muara Enim dan Kab. Banyuasin didapat dari tautan <https://linktr.ee/gfskanwil> yang disediakan kantor pusat DJPb (Dit. APK). Data keuangan pemerintah daerah tersebut kemudian diolah dengan menggunkan kertas kerja *excel* LRA LKPKD. Data laporan operasional dan data neraca pemerintah daerah konsolidasian merupakan data estimasi yang didapat dari data realisasi anggaran pemda yang kemudian diolah dengan menggunakan kertas kerja *excel* estimasi neraca dan LO LKPKD. Selanjutnya dilakukan pengunggahan data LKPKD ke aplikasi SIKRI Modul

Pelaporan. Data LKPP tersedia langsung pada aplikasi SIKRI Modul Pelaporan.

Atas data LKPDK dan LKPP tersebut dilakukan proses konsolidasian dan eliminasi akun-akun resiprokal dengan menggunakan aplikasi SIKRI Modul Pelaporan

METODOLOGI

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran II PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yang disusun berdasarkan pendekatan *high level mapping*, terdiri dari Laporan Operasional yang di-*mapping* menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian dan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan data *given* yang tersedia pada aplikasi SIKRI modul Pelaporan yang telah terekonsiliasi dari seluruh satuan kerja (UAKPA) yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 16 Kab/kota diperoleh langsung dari pemerintah kab/kota bersangkutan dan 2 kab/kota yaitu Kab Muara Enim dan Kab. Banyuasin didapat dari tautan <https://linktr.ee/gfskanwil> yang disediakan kantor pusat DJPb (Dit. APK). Data Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan untuk data

Laporan Operasional (LO) dan Neraca merupakan data estimasi yang didapat dari proses *mapping* data realisasi anggaran dengan menggunakan kerta kerja *excel* estimasi neraca LO. Atas data Pemerintah Daerah tersebut dilakukan proses konsolidasi dan diunggah ke aplikasi SIKRI Modul Pelaporan.

3. Proses konsolidasi LKPKD dan LKPP dilakukan secara sistem melalui aplikasi SIKRI Modul Pelaporan dengan melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi akun-aku resiprokal.
4. Terdapat perbedaan antara *face* LO Statistik Keuangan Pemerintah yang dihasilkan dari SIKRI, khususnya pada *Net Transactions In Assets And Liabilities* dan *Transactions In Financial Assets And Liabilities (Financing)* dengan Table 3 GFS (*Transactions in Assets in Liabilities*) yang juga dihasilkan dari SIKRI. Data yang digunakan sebagai dasar analisis indikator fiskal adalah data dari Table GFS.
5. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Gedung Keuangan Negara LT.2 JL. Kapten A. Rivai No. 2-4



LAMPIRAN ANALISIS RASIO





**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

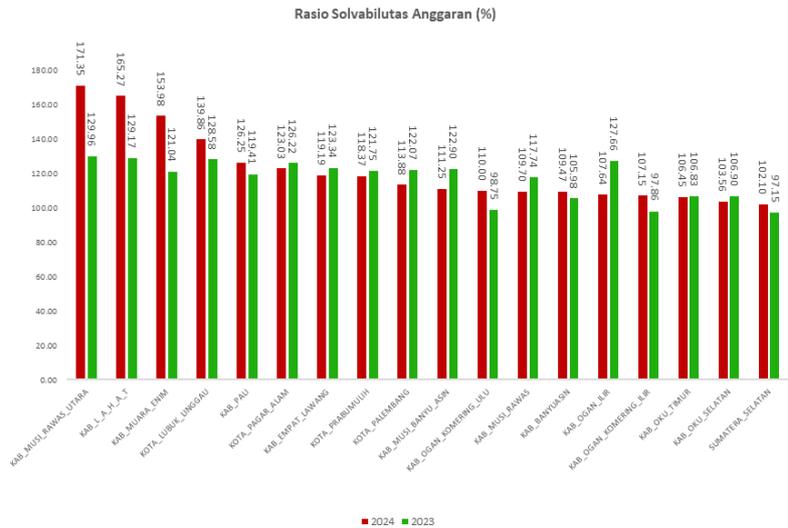
A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 405,61% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi baik dimana setiap Rp100 kewajiban jangka pendek dijamin dengan Rp405,61 aset lancar. Rasio solvabilitas jangka pendek periode sampai dengan triwulan IV 2024 meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 269,12%.
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio solvabilitas jangka panjang pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 199,25% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dalam kondisi baik dimana setiap Rp100,-. Kewajiban Jangka Panjang dijamin dengan Rp199,25.

2. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian

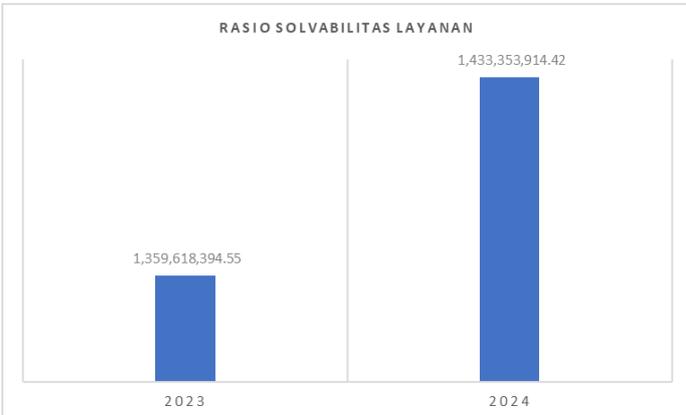
No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 0,193, yang menandakan berada pada kategori rendah, rasio sedikit menurun jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang berada pada 0,198. Penurunan mencerminkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pendapatan transfer meningkat, dimana pada triwulan IV 2024, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah meningkat 22,17% dibanding periode yang sama tahun 2024.</p> <p>Jika dilihat dari rasio masing-masing pemda s.d triwulan IV 2024, dari 18 terdapat 2 Pemda yang masuk dalam kategori sedang yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,48 dan Kota Palembang sebesar 0,34. Rasio 16 Pemda</p>



Jika dilihat data per pemda di Sumatera Selatan, rasio solvabilitas anggaran s.d Triwulan IV 2024 menunjukkan angka diatas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemda di Sumsel mampu menutupi belanja untuk pelaksanaan pemerintahan (operasi) dengan menggunakan pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Terlihat dari grafik, tertinggi terdapat pada Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara sebesar 171,35% dan terendah terdapat pada Pemprov. Sumsel sebesar 102,10%.
Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.

3. Rasio Solvabilitas Layanan

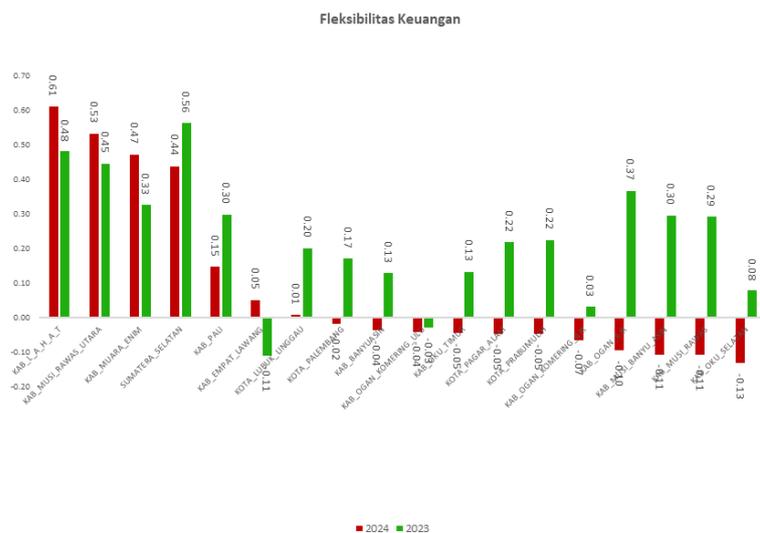
Rasio Solvabilitas Layanan di Sumatera Selatan Triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka Rp1.433.353.914,42 yang berarti bahwa untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima oleh per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemda di Sumatera Selatan dapat dipenuhi /dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp1.433.353.914,42. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 5,42% (yoy).



Jika dilihat dari rasio layanan di masing-masing Pemda, nilai tertinggi terdapat pada pemda Kota Pagaralam dan nilai terendah terdapat pada pemda provinsi Sumatera Selatan. Tingginya rasio layanan di Kota Pagaralam menunjukkan kondisi jumlah aset yang tercantum dalam neraca lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Pagaralam.

Hal ini menunjukkan adanya indikasi dana yang belum ditentukan peruntukannya dan berpotensi menjadi SiLPA. Angka rasio fleksibilitas yang terlalu besar menunjukkan kinerja daerah yang tidak begitu *perform* namun rasio yang terlalu kecil menjadi indikator pengelolaan keuangan yang tidak baik.

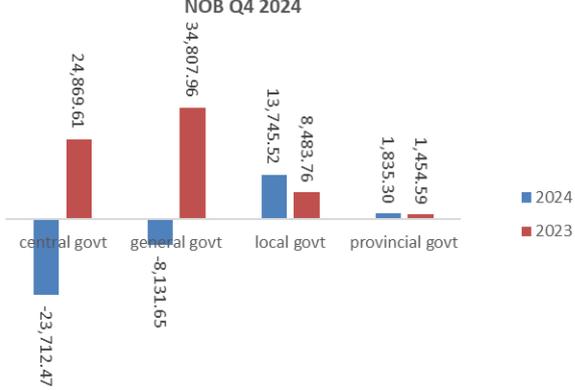
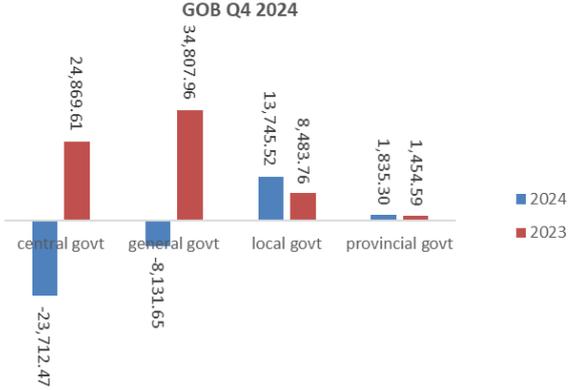
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023, nilai rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan penurunan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa dana pendapatan yang diperoleh dari pemda masih mampu dikelola secara aktif dalam bentuk belanja daerah.

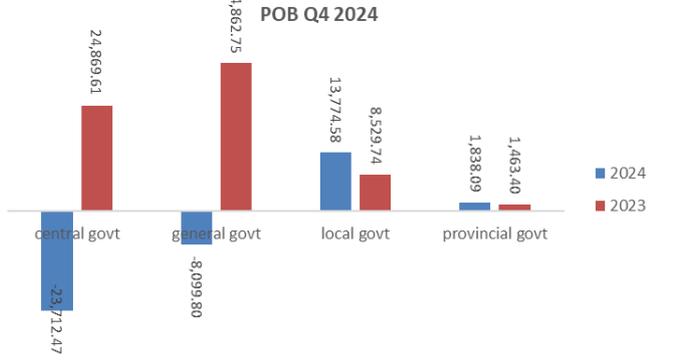


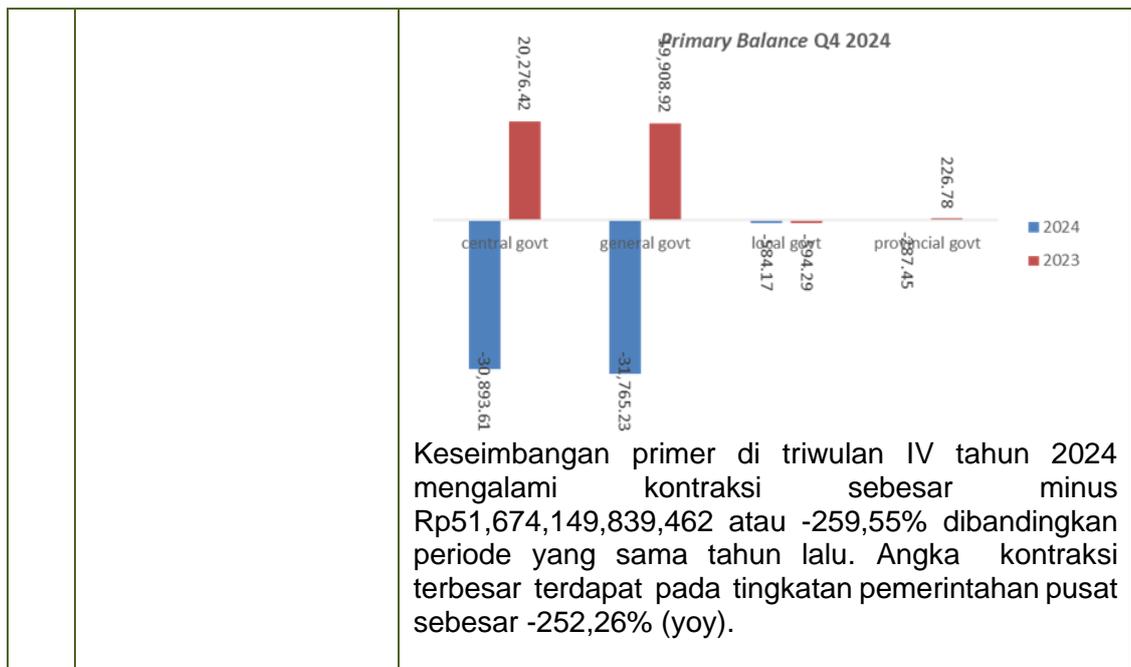
Dari 18 Pemda terdapat 11 pemda yang menunjukkan angka minus. Rasio fleksibilitas keuangan terendah terdapat pada Pemerintah Kab. OKU Selatan sebesar -13,30%. Nilai rasio fleksibilitas keuangan tertinggi terdapat pada pemerintah Kabupaten Lahat sebesar 61,10%. Namun, melihat rumusan perhitungan rasio fleksibilitas keuangan yang mengukur pendapatan yang belum teralokasikan mampu untuk membiayai belanja operasional dan pokok utang. Angka rasio yang minus menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan tidak tertutupi dari pendapatan yang belum dialokasikan tersebut, sedangkan sebaliknya angka rasio yang besar menunjukkan adanya dana yang belum digunakan untuk mendorong kinerja fiskal daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan rasio tersebut agar fleksibilitas keuangan yang dimiliki merupakan fleksibilitas daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah
1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Keseimbangan Operasi Neto (<i>Net Operating Balance</i>)	Perubahan kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan nilai negatif sebesar minus Rp8,131,653,660,432. Angka minus tersebut dikarenakan tidak adanya lagi komponen angka

		<p>pendapatan penyesuaian pada <i>other revenue</i> di level pemerintah pusat yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kontributor utama angka pendapatan pada Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah. Sedangkan pada level pemerintah daerah (<i>local government</i>), nilai Keseimbangan Operasi Neto menunjukkan angka positif dan meningkat dari tahun 2023 yang disebabkan terdapat kenaikan pendapatan khususnya pada pendapatan transfer.</p>  <p>Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan yang telah dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Gross Operating Balance</i>)	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Bruto periode triwulan IV tahun 2024 sama dengan nilai Keseimbangan Operasi Neto. Seharusnya, nilai NOB mencakup semua beban, sedangkan nilai GOB tidak memperhitungkan Konsumsi Aset Tetap. Namun, saat ini komponen pembentuk Laporan Operasional Statistik adalah Laporan Realisasi Anggaran sehingga tidak mencatat konsumsi aset tetap.</p> 
3.	Peminjaman/Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing</i>)	<p>Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, terdapat <i>Net Borrowing</i> pada LO Statistik yang menunjukkan nilai sebesar minus Rp31,797,084,835,415 yang berarti terdapat penurunan sebesar minus Rp11,942,956,393,730 atau -60,15% dibanding tahun 2023 yang mencatatkan angka positif, <i>net lending</i>, yaitu sebesar Rp19,854,128,441,685.</p>

		<p>Kondisi <i>Net Borrowing</i> terjadi pada semua level pemerintahan dan dikontribusi terbesar oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai beban operasional dan investasi aset non keuangan.</p>  <table border="1"> <caption>NLB Q4 2024</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>20,276,42</td> <td>-30,893,61</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>19,854,13</td> <td>-31,797,08</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>840,26</td> <td>-13,23</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>217,97</td> <td>90,24</td> </tr> </tbody> </table>	Level	2023	2024	central govt	20,276,42	-30,893,61	general govt	19,854,13	-31,797,08	local govt	840,26	-13,23	provincial govt	217,97	90,24
Level	2023	2024															
central govt	20,276,42	-30,893,61															
general govt	19,854,13	-31,797,08															
local govt	840,26	-13,23															
provincial govt	217,97	90,24															
4.	<p>Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>)</p>	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Primer triwulan IV tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai negative yaitu sebesar minus Rp8,099,802,028,126. Nilai POB di triwulan IV 2024 menunjukkan kontraksi sebesar minus Rp42,962,549,926,624 atau -123,23% dari periode yang lalu. Nilai negatif dikontribusi oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat kondisi pendapatan tidak menutupi belanja operasional.</p>  <table border="1"> <caption>POB Q4 2024</caption> <thead> <tr> <th>Level</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>24,869,61</td> <td>-23,712,47</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>34,862,75</td> <td>-8,099,80</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>8,529,74</td> <td>13,774,58</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>1,463,40</td> <td>1,838,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>POB pada tingkatan pemerintah daerah (Provinsi dan Kab/Kota) menunjukkan angka positif yang berarti kondisi pendapatan menutupi kebutuhan operasional. Selain itu pada tingkatan pemerintah daerah nilai POB mengalami pertumbuhan di tahun 2024 khususnya pada local government.</p>	Level	2023	2024	central govt	24,869,61	-23,712,47	general govt	34,862,75	-8,099,80	local govt	8,529,74	13,774,58	provincial govt	1,463,40	1,838,09
Level	2023	2024															
central govt	24,869,61	-23,712,47															
general govt	34,862,75	-8,099,80															
local govt	8,529,74	13,774,58															
provincial govt	1,463,40	1,838,09															
5.	<p>Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>)</p>	<p>Nilai Keseimbangan Primer triwulan IV tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai negatif sebesar minus Rp31,765,233,203,109. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu membiayai seluruh pengeluaran dan memenuhi kewajiban pembayaran atas <i>interest expense</i> tanpa menimbulkan utang yang baru sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga.</p>															

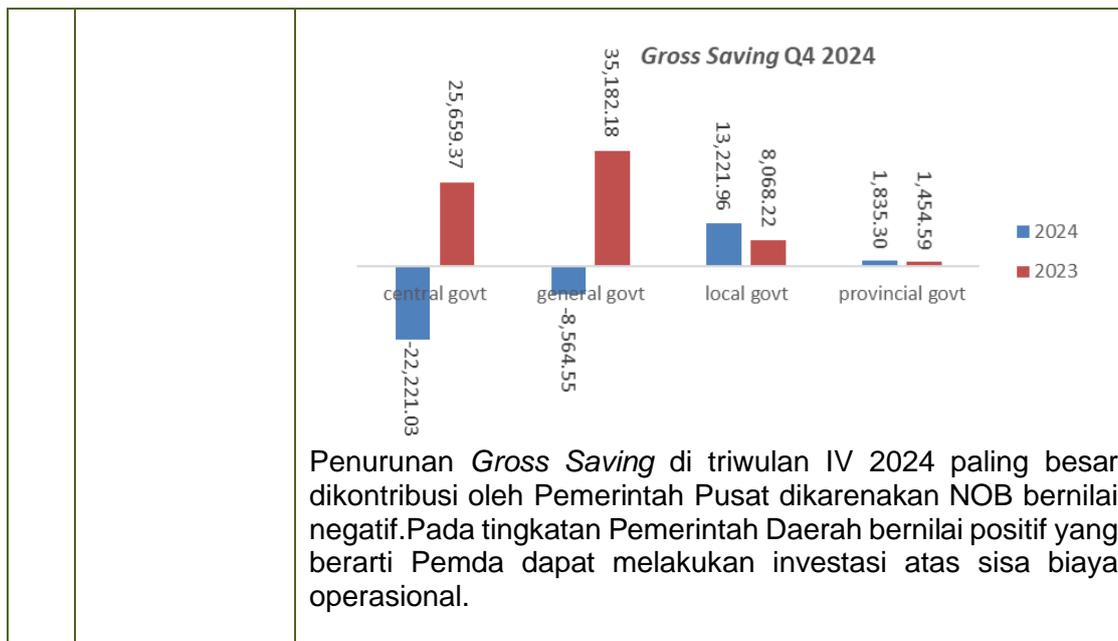


2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi lainnya

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis															
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	<p>Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 11,098,884,887,925. Pajak Langsung sebagian besar berupa <i>Taxes on income, profits, and capital gain</i> atau Pajak Penghasilan yang pemungutannya merupakan kewenangan pada Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan didominasi oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan. Pajak Langsung Lainnya berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) mengalami kenaikan pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 3,582,826,641,724. atau 47,67% dibanding periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 7,516,058,246,201. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari kenaikan PPh 21 pribadi dan Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <table border="1"> <caption>Direct Taxes Q4 2024</caption> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>10,113.83</td> <td>7,132.00</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>11,098.88</td> <td>7,516.06</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>985.05</td> <td>384.06</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dilihat dari kontribusi penerimaan <i>direct taxes</i>, paling besar berasal dari tingkatan pemerintah pusat (<i>central government</i>) yang didorong oleh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Dari sisi</p>	Government Level	2024	2023	central govt	10,113.83	7,132.00	general govt	11,098.88	7,516.06	local govt	985.05	384.06	provincial govt	0.00	0.00
Government Level	2024	2023															
central govt	10,113.83	7,132.00															
general govt	11,098.88	7,516.06															
local govt	985.05	384.06															
provincial govt	0.00	0.00															

		<p>pertumbuhan, pemerintah kabupaten/kota (<i>local government</i>) memberikan pertumbuhan sebesar 63,90% yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.</p>															
2.	<p>Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)</p>	<p>Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan IV 2024 sebesar Rp14,288,148,994,451.00. Pajak Tidak Langsung mengalami penurunan yaitu sebesar minus Rp1,274,498,614,380 atau -8,19% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp15,562,647,608,831</p> <p style="text-align: center;">Indirect Taxes Q4 2024</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>8,241.36</td> <td>9,672.04</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>14,288.15</td> <td>15,562.65</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>1,301.91</td> <td>1,241.26</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>4,744.88</td> <td>4,649.35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dilihat dari angka penerimaan Indirect Taxes di triwulan IV 2024, kontraksi penerimaan terjadi pada tingkatan pemerintah pusat sebesar -14,79% (yoy). Untuk tingkatan pemerintahan daerah (<i>local government</i> dan <i>provincial government</i>) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 4,89% (yoy) dan 2,05% (yoy).</p> <p>Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Hal tersebut dapat menggambarkan kondisi konsumsi masyarakat di Sumsel masih bertumbuh.</p>	Government Level	2024	2023	central govt	8,241.36	9,672.04	general govt	14,288.15	15,562.65	local govt	1,301.91	1,241.26	provincial govt	4,744.88	4,649.35
Government Level	2024	2023															
central govt	8,241.36	9,672.04															
general govt	14,288.15	15,562.65															
local govt	1,301.91	1,241.26															
provincial govt	4,744.88	4,649.35															
3.	<p>Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)</p>	<p>Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) s.d Triwulan IV 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp535,861,484,780 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 120,321,982,496 atau 28,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 415,539,502,284. Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) hanya terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kenaikan Pajak Modal (<i>Capital taxes</i>) tersebut mengindikasikan adanya peningkatan investasi/pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.</p>															

		<p style="text-align: center;">Capital Taxes Q4 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>535.86</td> <td>415.54</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>535.86</td> <td>415.54</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	0.00	0.00	general govt	535.86	415.54	local govt	535.86	415.54	provincial govt	0.00	0.00
Government Level	2024	2023															
central govt	0.00	0.00															
general govt	535.86	415.54															
local govt	535.86	415.54															
provincial govt	0.00	0.00															
4.	<p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah (Government Final Consumption Expenditure)</p>	<p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah s.d Triwulan IV 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp33,684,359,399,035 yang mengalami penurunan sebesar minus Rp221,229,395,820 atau -0,65% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp33,905,588,794,855. Apabila melihat komponen pembentuk Belanja Konsumsi Final Pemerintah, telah terjadi kenaikan pada komponen <i>compensation of employee</i> dan <i>Sales of goods and services</i>.</p> <p style="text-align: center;">Government Final Consumption Expenditure Q4 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>10,048.74</td> <td>9,162.72</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>33,684.36</td> <td>33,905.59</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>19,119.35</td> <td>20,076.57</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>4,516.27</td> <td>4,666.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dilihat secara perbandingan per tingkatan, Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada tingkatan <i>Central Government</i> memberikan dorongan pertumbuhan terbesar. Pada tingkatan pemerintah daerah (<i>Local Government</i> dan <i>Provincial Government</i>) mengalami kontraksi dikarenakan peningkatan retribusi di triwulan IV 2024 yang menjadi bagian dari <i>Sales of Goods and Services</i>.</p>	Government Level	2024	2023	central govt	10,048.74	9,162.72	general govt	33,684.36	33,905.59	local govt	19,119.35	20,076.57	provincial govt	4,516.27	4,666.30
Government Level	2024	2023															
central govt	10,048.74	9,162.72															
general govt	33,684.36	33,905.59															
local govt	19,119.35	20,076.57															
provincial govt	4,516.27	4,666.30															
5.	<p>Tabungan Bruto (Gross Saving)</p>	<p>Tabungan Bruto (Gross Saving) s.d Triwulan IV 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar minus Rp 8,564,545,283,073 yang mengalami penurunan sebesar minus Rp43,746,729,796,919.00 atau -124,34% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp35,182,184,513,846.</p>															



3. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis															
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	<p>Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) s.d Triwulan IV 2024 merupakan nilai yang sama dengan <i>Net Lending/Net Borrowing</i> (selisih antara akuisisi aset keuangan neto dengan keterjadian kewajiban neto). Total Pembiayaan pada LO Statistik menunjukkan nilai negatif sebesar minus Rp32,920,012,986,432, yang berarti juga terdapat <i>Net Borrowing</i> dengan nilai yang sama. Terdapat penurunan Total Pembiayaan sebesar minus Rp52,774,141,428,117 atau -265,18% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp19,854,128,441,685.00. Penurunan terjadi pada seluruh level pemerintahan baik pusat maupun daerah.</p> <table border="1"> <caption>Total Financing Q4 2024</caption> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>-30,893.61</td> <td>20,276.42</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>-32,920.01</td> <td>19,854.13</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>1,974.77</td> <td>2,010.26</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>217.97</td> <td>1,001.63</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	-30,893.61	20,276.42	general govt	-32,920.01	19,854.13	local govt	1,974.77	2,010.26	provincial govt	217.97	1,001.63
Government Level	2024	2023															
central govt	-30,893.61	20,276.42															
general govt	-32,920.01	19,854.13															
local govt	1,974.77	2,010.26															
provincial govt	217.97	1,001.63															
2.	Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>)	<p>Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) merupakan bentuk dari upaya optimaslisasi <i>Net Lending (Net Borrowing)</i>. Pada triwulan IV tahun 2024, <i>Net Borrowing</i> sebesar minus Rp32,920,012,986,432 merupakan Transaksi Aset Keuangan dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban</p>															

		<p>dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.</p> <p>Domestic Financing Q4 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>-30,893.61</td> <td>20,276.42</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>-32,920.01</td> <td>19,854.13</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>-974.77</td> <td>890.26</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>0</td> <td>217.97</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	-30,893.61	20,276.42	general govt	-32,920.01	19,854.13	local govt	-974.77	890.26	provincial govt	0	217.97
Government Level	2024	2023															
central govt	-30,893.61	20,276.42															
general govt	-32,920.01	19,854.13															
local govt	-974.77	890.26															
provincial govt	0	217.97															
3.	Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)	Seluruh pembiayaan yang terjadi pada wilayah Sumatera Selatan merupakan Pembiayaan yang bersumber dari dalam Negeri. Pembiayaan melalui luar negeri hanya dilakukan pada level BA-BUN kemudian akan diteruskan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.															

4. Analisis Indikator Kekayaan Utang

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis															
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	<p>Jumlah Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) pada wilayah Sumatera Selatan s.d Triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp5,196,342,610,899. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan dan sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek (Utang Transfer dan Belanja yang Masih Harus di Bayar).</p> <p>Gross Debt Q4 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>2,180.00</td> <td>2,375.36</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>5,196.34</td> <td>5,515.56</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>2,257.68</td> <td>2,381.53</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>1,917.96</td> <td>1,917.96</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	2,180.00	2,375.36	general govt	5,196.34	5,515.56	local govt	2,257.68	2,381.53	provincial govt	1,917.96	1,917.96
Government Level	2024	2023															
central govt	2,180.00	2,375.36															
general govt	5,196.34	5,515.56															
local govt	2,257.68	2,381.53															
provincial govt	1,917.96	1,917.96															
2.	Utang Netto (<i>Net Debt</i>)	<p>Nilai Utang Netto (<i>Net Debt</i>) pada wilayah Sumatera Selatan sama dengan nilai Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>), karena pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki aset berupa <i>Monetary Gold & Special Drawings</i>. LSKP yang disusun pada level wilayah Sumatera Selatan saat ini hanya mencakup lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tidak termasuk korporasi. Sebagai informasi tambahan bahwa <i>Monetary Gold</i> merupakan emas yang dimiliki dan disimpan</p>															

		sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia), sedangkan Special Drawings merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan.
--	--	---

C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Uraian	s.d Triwulan IV Tahun 2024	s.d Triwulan IV Tahun 2023
Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	405.61%	296.12%
Aset Lancar	14,215,700,365,538.00	11,043,323,721,666
Kewajiban Jangka Pendek	3,504,788,428,842.34	3,729,306,852,107
Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	199.25%	183.53%
Total Aset	337,048,575,604,087.00	327,838,239,333,581
Kewajiban Jangka Panjang	1,691,554,182,057.51	1,786,251,046,391

b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah s.d Triwulan IV Tahun 2024

No	Pemerintah Prov/Kan/Kota	Rasio									
		Kemandirian Keuangan Daerah		Solvabilitas Anggaran		Solvabilitas Layanan		Solvabilitas Operasional		Fleksibilitas Keuangan	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Prov. Sumatera Selatan	0.48	0.50	102.10	97.15	406848357.2	399682517.45	146.03	159.74	0.44	0.56
2	Kab. Musi Banyuasin	0.10	0.10	111.25	122.90	1167109601	1255970103.00	89.18	34.44	-0.11	0.30
3	Kab. Ogan Komerling Ulu	0.09	0.06	110.00	98.75	859101731.1	852929501.91	95.76	96.90	-0.04	-0.03
4	Kab. Muara Enim	0.10	0.10	153.98	121.04	1430302499	1377097494.51	147.60	132.50	0.47	0.33
5	Kab. Lahat	0.06	0.06	165.27	129.17	1509844287	1313369261.99	161.01	148.10	0.61	0.48
6	Kab. Musi Rawas	0.07	0.06	109.70	117.74	1334977399	982999116.58	89.06	129.10	-0.11	0.29
7	Kab. Ogan Komerling Ilir	0.10	0.07	107.15	97.86	1091607711	1075445475.57	93.35	103.04	-0.07	0.03
8	Kab. Banyuasin	0.10	0.11	109.47	105.98	1445844110	1411152862.98	97.56	112.82	-0.04	0.13
9	Kab. OKU Timur	0.05	0.07	106.45	106.83	653561025.9	591091451.62	95.35	113.20	-0.05	0.13
10	Kab. OKU Selatan	0.03	0.05	103.56	106.90	612097042.5	577228471.41	88.63	112.99	-0.13	0.08
11	Kab. Ogan Ilir	0.08	0.10	107.64	127.66	1644977907	1505191098.46	92.42	136.69	-0.10	0.37
12	Kab. Empat Lawang	0.04	0.05	119.19	123.34	602117315.8	535037899.79	104.96	106.60	0.05	-0.11
13	Kab. Pali	0.04	0.05	126.25	119.41	795850120.5	785797096.82	114.57	129.77	0.15	0.30
14	Kab. Musi Rawas Utara	0.07	0.05	171.35	129.96	774046846.2	694459022.27	153.33	144.57	0.53	0.45

15	Kota Palembang	0.34	0.34	113.88	122.07	1094184707	1034276331.51	99.13	118.37	-0.02	0.17
16	Kota Prabumulih	0.11	0.10	118.37	121.75	881443449.7	785950139.50	95.11	122.44	-0.05	0.22
17	Kota Pagaralam	0.10	0.09	123.03	126.22	1882407925	1811859279.96	95.11	121.79	-0.05	0.22
18	Kota Lubuk Linggau	0.12	0.12	139.86	128.58	1766654746	1833282214.15	103.76	125.25	0.01	0.20
		0.19	0.19	116.98	111.85	143335314.42	1359618394.55	113.50	130.47	0.13	0.28

2. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal s.d Triwulan IV Tahun 2024

(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	-23,712.47	-23,712.47	-30,893.61	-23,712.47	-30,893.61
2	Pemerintah Kab/Kota	13,745.52	13,745.52	-613.23	13,774.58	-584.17
3	Pemerintah Provinsi	1,835.30	1,835.30	-290.24	1,838.09	-287.45
4	Pemerintah Umum	-8,131.65	-8,131.65	-31,797.08	-8,099.80	-31,765.23

Analisis Keseimbangan Fiskal s.d Triwulan IV Tahun 2023

(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	24,869.61	24,869.61	20,276.42	24,869.61	20,276.42
2	Pemerintah Kab/Kota	8,483.76	8,483.76	-640.26	8,529.74	-594.29
3	Pemerintah Provinsi	1,454.59	1,454.59	217.97	1,463.40	226.78
4	Pemerintah Umum	34,807.96	34,807.96	19,854.13	34,862.75	19,908.92

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya s.d Triwulan IV Tahun 2024

(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Perintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	10,113.83	8,241.36	0.00	10,048.74	-22,221.03
2	Pemerintah Kab/Kota	985.05	1,301.91	535.86	19,119.35	13,221.96
3	Pemerintah Provinsi	0.00	4,744.88	0.00	4,516.27	1,835.30
4	Pemerintah Umum	11,098.88	14,288.15	535.86	33,684.36	-8,564.55

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya s.d Triwulan IV Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Perintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	7,132.00	9,672.04	0.00	9,162.72	25,659.37
2	Pemerintah Kab/Kota	384.06	1,241.26	415.54	20,076.57	8,068.22
3	Pemerintah Provinsi	0.00	4,649.35	0.00	4,666.30	1,454.59
4	Pemerintah Umum	7,516.06	15,562.65	415.54	33,905.59	35,182.18

c. Analisis Indikator Pembiayaan

Analisis Indikator Pembiayaan s.d Triwulan IV Tahun 2024
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	-30,893.61	-30,893.61			
2	Pemerintah Kab/Kota	-1,974.77	-1,974.77			
3	Pemerintah Provinsi	-51.63	-51.63			
4	Pemerintah Umum	-32,920.01	-32,920.01			

Analisis Indikator Pembiayaan s.d Triwulan IV Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	20,276.42	20,276.42			
2	Pemerintah Kab/Kota	-640.26	-640.26			
3	Pemerintah Provinsi	217.97	217.97			
4	Pemerintah Umum	19,854.13	19,854.13			

d. Analisis Indikator Kekayaan Utang

Analisis Indikator Kekayaan Utang s.d Triwulan III Tahun 2024
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	2,180.00	2,180.00
2	Pemerintah Kab/Kota	2,257.68	2,257.68
3	Pemerintah Provinsi	1,917.96	1,917.96
4	Pemerintah Umum	5,196.34	5,196.34

Analisis Indikator Kekayaan Utang s.d Triwulan III Tahun 2023
(dalam miliar)

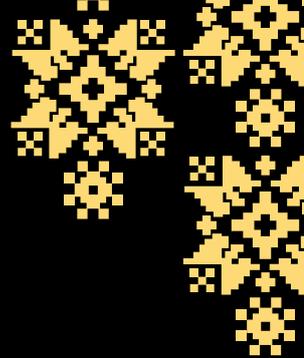
No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	2,375.36	2,375.36
2	Pemerintah Kab/Kota	2,381.53	2,381.53
3	Pemerintah Provinsi	1,917.96	1,917.96
4	Pemerintah Umum	5,515.56	5,515.56

Palembang, Februari 2025
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto





Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Palembang - 30 129, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I
Kota Palembang, Sumatera Selatan
Telp. (0711) 356534